



# SANG PENCERAH

## Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton

E-ISSN: 2655-2906, P-ISSN: 2460-5697

Volume 11, No 1, Tahun 2025

### Strategi Tni dalam Menanggulangi Gerakan Separatis Papua Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan dan Kesejahteraan Papua

Fransisco<sup>1\*</sup>, Afrizal Hendra<sup>2</sup>, CDB. Andries<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan RI Indonesia

<sup>3</sup>Sekolah Staf dan Komando Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Indonesia

\*Korespondensi: [skmjurnal@gmail.com](mailto:skmjurnal@gmail.com)

#### Info Artikel

Diterima 21  
September 2024

Disetujui 27  
Januari 2025

Dipublikasikan 12  
Februari 2025

**Keywords:**  
Strategi TNI;  
Gerakan Separatis;  
Keamanan;  
Kesejahteraan

©2025 The  
Author(s): This is  
an open-access  
article distributed  
under the terms of  
the Creative  
Commons  
Attribution  
ShareAlike (CC BY-  
SA 4.0)



#### Abstrak

*Gerakan Separatis Papua telah menyebabkan ketidakstabilan keamanan dan kesejahteraan dengan aksi kekerasan bersenjata seperti penyerangan terhadap aparat keamanan dan warga sipil. TNI turut dilibatkan dalam konteks Bantuan Operasi yang digelar oleh Polri dalam menumpas KSP. Akan tetapi, pengerahan TNI dalam penyelesaian konflik di Papua selalu dikaitkan dengan HAM. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pendekatan strategi penyelesaian konflik yang terjadi di Papua melalui konsep pendekatan Smart Power, yang melibatkan semua elemen bangsa untuk membantu mencari jalan penyelesaian yang terbaik terhadap konflik di Papua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TNI berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pelaksanaan Otsus melalui berbagai pendekatan strategis. TNI juga menghadapi beberapa tantangan seperti penggunaan kekuatan berlebihan yang telah menimbulkan korban jiwa dan pelanggaran HAM. Strategi TNI menangani konflik di Papua memiliki dampak yang kompleks dan bervariasi. Meskipun telah memberikan beberapa kemajuan, masih ada tantangan yang perlu diatasi dalam rangka mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Kesimpulan yaitu strategi Smart Power yang diterapkan oleh TNI dalam menanggulangi konflik di Papua merupakan pendekatan yang menggabungkan elemen "Hard Power" dan "Soft Power" untuk mencapai stabilitas dan kesejahteraan di wilayah tersebut. Strategi ini dirancang untuk menangani kompleksitas konflik dengan cara yang lebih holistik dan efektif.*

#### Abstract

*The Papuan Separatist Movement has caused instability in security and welfare with armed violence such as attacks on security forces and civilians. The TNI was also involved in the context of Operational Assistance held by the Police in crushing the KSP. However, the deployment of the TNI in resolving the conflict in Papua is always associated with human rights. This study aims to discuss the strategic approach to resolving the conflict in Papua through the Smart Power approach concept, which involves all elements of the nation to help find the best solution to the conflict in Papua. This study uses a qualitative research method. The results of the study show that the TNI plays an important role in maintaining security stability and supporting the implementation of Special Autonomy through various strategic approaches. The TNI also faces several challenges such as the use of*

*excessive force that has resulted in casualties and human rights violations. The TNI's strategy in dealing with the conflict in Papua has a complex and varied impact. Although it has made some progress, there are still challenges that need to be overcome in order to achieve sustainable peace. The conclusion is that the Smart Power strategy implemented by the TNI in dealing with the conflict in Papua is an approach that combines elements of "Hard Power" and "Soft Power" to achieve stability and welfare in the region. This strategy is designed to address the complexity of conflict in a more holistic and effective manner.*

## 1. Pendahuluan

Papua mengalami permasalahan yang berkepanjangan dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memulihkan menjadi lebih baik dan terbebas dari semua persoalan yang selama ini menimpa Papua (Sianturi & Hanita, 2020). Konflik bukan mustahil berawal dari ketidakadilan ekonomi, kemudian menyebar menjadi konflik identitas kesukuan yang memberikan kekuatan lebih untuk menumpuk kebencian dan memberikan dampak panjang terselesaikannya konflik tersebut (Hidayat & Arafat, 2022). Pembangunan yang tidak merata, merupakan salah satu persoalan yang menjadi titik tolak dan akar dari munculnya berbagai konflik (Kurniawan et al., 2024) (Kennedy, 2016) (Kaisupy & Maing, 2021). Persoalan kemiskinan, kesenjangan budaya, ketimpangan pembangunan antara satu daerah dengan yang lain, korupsi, dan sebagainya adalah persoalan krusial yang tidak mudah diselesaikan tanpa good will pemerintah (Merina, 2023). Oleh karena itu, sangat diperlukan komitmen yang kuat dan tindakan yang tegas dalam rangka menyejahterakan masyarakat.

Berdasarkan penelitian LIPI yang dilakukan pada tahun 2009, terdapat empat persoalan dasar yang menjadi akar konflik di Papua, yaitu (Suropati, 2019): 1) Marginalisasi dan Diskriminasi, Orang asli Papua merasa terpinggirkan dan didiskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hal ini memicu rasa tidak puas dan ketidakadilan, yang pada akhirnya berujung pada konflik; 2) Kegagalan Pembangunan, Pembangunan di Papua dianggap lamban dan tidak merata. Kegagalan ini terlihat dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Hal ini semakin memperparah rasa tidak puas dan ketidakadilan orang asli Papua; 3) Kontradiksi Sejarah dan Politik, Terdapat kontradiksi sejarah dan politik antara Papua dan Indonesia. Orang asli Papua memiliki sejarah dan budaya yang berbeda dengan Indonesia. Mereka juga memiliki aspirasi politik yang berbeda, yaitu kemerdekaan. Kontradiksi ini menjadi salah satu pemicu utama konflik di Papua; 4) Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Telah terjadi pelanggaran HAM yang berulang kali di Papua. Hal ini semakin memperkeruh situasi dan memperkuat rasa tidak percaya orang asli Papua terhadap pemerintah Indonesia.

Masalah ketimpangan kesejahteraan di Papua dalam masa konflik berkepanjangan dapat di lihat dari beberapa sisi diantaranya: Pertama, Ketimpangan Pembangunan, Pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Papua belum merata. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi yang signifikan antara Papua dengan daerah lain di Indonesia. Kedua, Kurangnya Peluang Ekonomi: Keterbatasan lapangan pekerjaan dan rendahnya pendapatan masyarakat menjadi faktor pemicu kekecewaan dan potensi perekrutan oleh KSP.

Dengan adanya Konflik bersenjata yang belum usai di Papua menyebabkan ketidakstabilan keamanan di beberapa daerah (Wibowo, 2023). Aksi kekerasan yang dilakukan KSP seperti penyerangan terhadap aparat keamanan dan warga sipil masih kerap terjadi. ketiga, Akses Pelayanan Publik Terbatas, Akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih masih terbatas di beberapa daerah Papua. Hal ini menghambat peningkatan kesejahteraan Masyarakat (Suhendrawan et al., 2023). Keempat, Tingkat Kemiskinan Tinggi: Tingkat kemiskinan di Papua masih jauh di atas rata-rata nasional. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kelima, Pengangguran Tinggi, Tingkat pengangguran di Papua juga tinggi. Hal ini menyebabkan banyak orang muda yang putus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan.

Data fakta yang ada terkait aksi yang dilakukan Gerakan Separatis Papua. Keberadaan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan Papua menjadi salah satu faktor utama ketidak stabilan. Mereka kerap melakukan aksi kekerasan bersenjata seperti penyerangan terhadap aparat keamanan dan warga sipil, Saat ini GSP Front Bersenjata ataupun kelompok yang menamakan diri TPN-PB/OPM (Tentara Pembebasan Nasional-Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka) masih aktif melaksanakan aksi-aksi gangguan keamanan dan penembakan yang menasar Apkam TNI/Polri dan Masyarakat Sipil, sepanjang Januari 2020 s.d. Maret 2021, telah terjadi 114 kali kontak tembak dan penembakan oleh KSP Front Bersenjata, yang mengakibatkan korban dari Apkam TNI/Polri dan masyarakat sipil. Tingginya ancaman kelompok separatis di Papua dan masifnya upaya internasionalisasi isu-isu Papua yang mendiskreditkan Apkam TNI/Polri dan Pem RI diperlukan peran intelijen yang proaktif dan prediktif. Sepanjang tahun 2023 terdapat 135 aksi gangguan keamanan dari KSP, Terdapat 112 korban jiwa (39 org TNI, 8 ORG Polri dan 65 org Masyarakat) di tahun 2024 terdapat 49 gangguan keamanan, 23 korban jiwa (11 tni, 4 polri, 8 masyarakat) , Selain itu, di dalam negeri khususnya di Papua, KSP sangat aktif melaksanakan manuver berupa aksi-aksi propaganda untuk mendapatkan simpati dari kalangan masyarakat OAP(Orang Asli Papua) dan aksi-aksi provokasi yang mendiskreditkan Apkam (Aparat Keamanan) dan Pemerintah Indonesia.

Kendala dalam penyelesaian konflik di Papua berangkat dari beberapa latar belakang yang ada diantaranya: pertama, terdapat beberapa generasi muda atau anak-anak di daerah yang saat ini berkonflik tidak di besarkan oleh orang tua. Kedua, mendapat warisan dendam kebencian, permusuhan dan hilangnya kepercayaan. Ketiga ketidak mampuan bersaing dengan pendatang. Keempat, masih banyanyak daerah yang terisolir (Asmoro & Swastanto, 2021). Tidak itu saja sejak timbulnya permasalahan di Papua sudah banyak upaya dan usaha yang telah di lakukan pemerintah untuk menyelesaikan Konflik yang terjadi namun hingga saat ini belum menemukan titik terang (Gumelar & Nachrawi, 2022).

Salah satu nya pelibatan TNI dalam membantu Polri saat staus keaman Papuan di tetapkan sebagai Gangguan keamanan yang dalam halini yang memegang kendali operasi pada Polri dan TNI sebagai Satuan perbantuan, namun pada kenyataanya situasi yang di hadapi bila berdasarkan Undang-Undang Dasar konflik yang di hadapi mengadirkan kelompok separatis yang sudah terorganisir, mengakui dirinya sebagai OPM, yang memiliki sebuah lambang dan bendera yang menuntut merdeka, dalam aksinya menggunakan senjata api, secara

UUD kelompok ini sudah melakukan aksi Makar yang di tidak secara operasi Militer (Lelemboto, 2023). Menyikapi dari uraian diatas TNI memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua. Saat ini pada pelaksanaanya TNI dilibatkan dalam konteks Bantuan Operasi yang digelar oleh Polri dalam menumpas KSP (Sumirat & Eriyanto, 2023). Dalam pelaksanaanya selama ini menghadapi berbagai permasalahan (Wanzira, 2022). Bila kita Kembali pada undang undang TNI yang menyebutkan salah satu dari dua tugas pokok TNI yaitu salah satunya dalam OMSP adalah mengatasi kelompok saporatis, dengan demikian ini mengartikan bahwa TNI sebagi unsur utama dalam operasi bukan sebagai unsur pembantu.

Data terkait pengerahan TNI dalam penyelesaian konflik di Papua yang di perdebatkan kelompok tertentu dapat dilihat dalam laporan "Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya" yang diluncurkan oleh YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia, bersama Bersihkan Indonesia (Mansyur, 2022). Laporan ini melaporkan bahwa pengerahan kekuatan militer Indonesia secara ilegal di kawasan pegunungan tengah Provinsi Papua telah menimbulkan kekerasan dan teror terhadap masyarakat sipil, terutama di Kabupaten Intan Jaya (Kobesi et al., 2019). Operasi militer ilegal ini juga memperparah eskalasi konflik bersenjata, menambah deretan kekerasan negara di Papua, dan memperparah teror bagi masyarakat sipil. Sedikitnya 10% penduduk Sugapa, ibukota Kabupaten Intan Jaya mengungsi, termasuk 331 perempuan dan anak-anak di awal tahun 2021, yang mana dalam kajian yang di sajikan memojokan TNI dan ini seharusnya di tanggapi dengan serius agar tidak menjadi pembodohan berita pada public (Aldiano, 2019).

Strategi terbaik militer dalam menganai kelompok saporatis bersenjata Papua adalah melalui Operasi Militer Selain Perang dalam pelaksanaan dapat dilakukan dengan pendekatan kolaboratif dan holistik yang memerlukan perdebatan alot dari para pemimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia, Atau juga dapat melalui pendekan smart power banyak di kenal saat ini, karena masalah Papua tidak hanya adalah masalah hukum, tetapi juga masalah politik (Simanjuntak et al., 2023). Strategi diplomasi pertahan merupakan komplemen dalam menangani masalah Papua, seperti diskriminasi dan ketidakadilan (Lubis, 2022). "Dialog damai sebagai strategi penyelesaian siklus kekerasan dan membuka jalan untuk isu-isu lain, ketidakadilan, diskriminasi, hak ulayat dan sebagainya" (Nugroho, 2022).

Berdasarkan latarbelakang diatas penelitian berupaya untuk menganalisa penyebab ketidakberhasilan dari setiap solusi yang telah diambil oleh pemerintah hingga saat ini dan banyaknya korban jiwa yang terus berjatuhan, TNI telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kelompok separatis Papua, termasuk operasi militer, operasi non-militer, dan penegakan hukum. Namun, upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil dalam menyelesaikan konflik di Papua. Penelitian memberikan rekomendasi strategi penyelesaian konflik yang terjadi di Papua melalui konsep pendekata *Smart Power*, yang melibatkan semua elemen bangsa yang merupakan bagian dari Negara ini untuk turut serta membantu mencari jalan penyelesaian yang terbaik bukan malah memojokan TNI/POLRI yang seolah-olah bekerja atas kemauan sendiri, yang bila di sadari bahwa TNI merupakan salah satu alat negara yang bertanggungjawab atas

kedaulatan Negara ini bila mendapat gangguan dan ancaman dari kelompok separatisme yang seperti saat ini terjadi di Papua.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif berfokus pada deskripsi mendalam mengenai sifat, hakikat, dan nilai suatu objek atau gejala tertentu, dengan tujuan memahami makna yang terkandung di dalamnya (Hafiz & Pratama, 2021). Dalam konteks strategi TNI dalam menanggulangi gerakan separatist Papua guna mewujudkan stabilitas keamanan dan kesejahteraan di Papua, pendekatan kualitatif memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap dinamika sosial, budaya, dan politik yang melatarbelakangi konflik tersebut. Melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana strategi yang diterapkan oleh TNI, baik melalui pendekatan militer maupun non-militer, berdampak pada kehidupan masyarakat Papua serta sejauh mana upaya tersebut berhasil dalam menciptakan keamanan dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Desain penelitian kualitatif dalam tesis berjudul "*Strategi TNI dalam Menanggulangi Kelompok Separatist Papua*" dirancang dengan mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset secara logis dan sistematis untuk membahas serta menganalisis strategi penyelesaian Konflik Separatist Papua (KSP). Metode kualitatif digunakan untuk menggali secara mendalam dinamika konflik, strategi yang diterapkan oleh TNI, serta dampaknya terhadap masyarakat Papua. Pendekatan ini mencakup pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, data langsung, serta analisis dokumen resmi dan media. Selain itu, penelitian ini menyoroti berbagai aspek seperti pendekatan militer, diplomasi, serta program kesejahteraan sosial yang diimplementasikan guna mengatasi akar permasalahan separatisme. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif mengenai *Strategi TNI dalam Menanggulangi Gerakan Separatist Papua Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan dan Kesejahteraan Papua*, sehingga dapat merumuskan solusi yang lebih efektif dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk aparat TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta akademisi yang memahami dinamika konflik di Papua. Observasi langsung dilakukan untuk memahami kondisi sosial, ekonomi, dan keamanan di daerah yang terdampak oleh gerakan separatist. Selain itu, analisis dokumen mencakup kajian terhadap laporan resmi, kebijakan pemerintah, media massa, serta penelitian terdahulu yang relevan. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya mendapatkan data yang akurat dan komprehensif mengenai strategi yang diterapkan oleh TNI dalam menanggulangi kelompok separatist Papua. Analisis data dilakukan secara tematik dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola, strategi, serta dampak dari upaya yang dilakukan TNI dalam menciptakan stabilitas keamanan dan kesejahteraan di Papua. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dikategorikan berdasarkan tema utama, seperti strategi militer, pendekatan diplomasi, serta program sosial-ekonomi. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara mendalam untuk menemukan hubungan antara kebijakan yang diterapkan dengan hasil yang dicapai di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih

komprehensif mengenai efektivitas strategi TNI dalam menangani gerakan separatis Papua guna mewujudkan stabilitas keamanan dan kesejahteraan di wilayah tersebut.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Mabes TNI sebagai Pusat Kendali Utama dalam Penanganan Konflik di Papua

Upaya menangani kompleksitas konflik yang melanda Papua, peran Mabes TNI (Markas Besar Tentara Nasional Indonesia) menjadi sangat vital. Sebagai pusat kendali utama, Mabes TNI mengambil berbagai langkah strategis untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan konflik di wilayah tersebut. Dengan fokus pada peningkatan keamanan, pembentukan strategi penyelesaian konflik yang inklusif, serta pengembangan pendekatan kesejahteraan yang beragam, Mabes TNI berupaya secara aktif dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan terwujudnya perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Papua.

Mabes TNI kendali utama dalam penanganan konflik di Papua. Berbagai langkah dan kebijakan telah diambil oleh Mabes TNI untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di wilayah tersebut. Pertama, Mabes TNI membentuk Komando Operasi (Koops) Habema sebagai respons terhadap konflik di Papua. Koops Habema diarahkan untuk mengadopsi strategi "*smart power*" yang menggabungkan elemen "*soft power*", "*hard power*", dan diplomasi militer. Pendekatan ini mencoba untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih holistik dan adaptif, dengan memperhitungkan aspek-aspek sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks di Papua. Kedua, Mabes TNI meningkatkan kehadiran aparat keamanan, termasuk TNI dan Polri, di wilayah Papua. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap aktivitas kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) seperti TPNPB-OPM. Kehadiran yang ditingkatkan ini diharapkan dapat memperkuat kontrol keamanan di wilayah Papua dan mengurangi risiko terjadinya kekerasan. Ketiga, Mabes TNI berperan dalam pengembangan strategi penyelesaian konflik Papua yang lebih inklusif. Strategi ini mencakup partisipasi aktif masyarakat Papua sebagai penentu utama dalam proses penyelesaian konflik. Korem 172/PWY juga dipandang sebagai salah satu elemen kunci dalam menciptakan kondisi yang akomodatif bagi penyelesaian konflik di Papua. Keempat, Mabes TNI mengembangkan pendekatan kesejahteraan yang beragam, termasuk pendekatan agama, budaya, kesetaraan, penghargaan HAM, dan pelestarian lingkungan hidup. Pendekatan ini ditujukan untuk menyelesaikan konflik Papua dengan cara yang lebih humanis dan menghargai keberagaman serta kebutuhan masyarakat Papua.

Konteks ini, Mabes TNI memainkan peran penting sebagai pusat kendali utama yang mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai aspek strategi penyelesaian konflik di Papua. Upaya ini melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga dan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan elemen-elemen masyarakat Papua sendiri. Dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, diharapkan konflik di Papua dapat diselesaikan secara berkelanjutan demi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Papua.

Mabes TNI memiliki peran sentral sebagai pusat kendali utama dalam operasi penanganan konflik di Papua. utama dalam menyusun strategi operasi, melibatkan

berbagai satuan dan kementerian/lembaga (K/L) terkait, serta mengoordinasikan pelaksanaan operasi di lapangan. Peran Mabes TNI mencakup pengumpulan data dan analisis situasi untuk menentukan status daerah konflik yang mengancam kedaulatan negara. Dalam hal ini, Mabes TNI menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat disertai dengan kajian dan evaluasi operasi untuk memberikan keyakinan kepada Presiden dalam mengambil keputusan mengenai status daerah operasi.

### **3.2 Peranan TNI dalam menanggulangi konflik di Papua melalui penetapan status daerah konflik**

#### **Penentuan Status Daerah Konflik**

Penentuan status daerah konflik di Papua dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat ancaman dan kondisi keamanan yang dihadapi. Status keadaan ditetapkan untuk menghadapi ancaman bersenjata, ancaman non-militer, dan gangguan keamanan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Terdapat tiga kategori utama dalam penentuan status daerah konflik, yaitu Tertib Sipil, Darurat Sipil, dan Darurat Militer. Status Tertib Sipil diterapkan dalam kondisi tata pemerintahan dan keamanan yang normal, di mana terdapat ancaman bersenjata atau gangguan non-militer yang memerlukan bantuan pelibatan TNI. Dalam situasi ini, operasi keamanan dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan tanpa memerlukan tindakan militer yang intensif. Status Darurat Sipil diterapkan ketika tata pemerintahan dan keamanan terancam oleh gangguan yang signifikan, yang memerlukan intervensi TNI untuk menjaga fungsi pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dalam kondisi ini, TNI bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya untuk memastikan stabilitas dan mengembalikan fungsi pemerintahan yang terganggu.

Status Darurat Militer diterapkan ketika keamanan dan ketertiban hukum terancam secara serius oleh pemberontakan bersenjata, gerakan separatis, atau ancaman keamanan lainnya yang memerlukan tindakan militer penuh. Dalam kondisi ini, TNI mengambil alih kendali keamanan dengan operasi militer yang intensif untuk mengatasi ancaman dan memulihkan stabilitas. Proses penentuan status ini melibatkan beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran. Tahap perencanaan melibatkan analisis situasi dan perumusan strategi operasi. Tahap persiapan mencakup penyiapan personel, peralatan, dan logistik. Tahap pelaksanaan melibatkan pelaksanaan operasi militer sesuai dengan rencana yang telah disusun. Tahap pengakhiran mencakup evaluasi dan penyesuaian strategi berdasarkan hasil operasi. Penentuan status ini penting untuk memastikan bahwa respon TNI terhadap ancaman di Papua dilakukan secara tepat dan proporsional, sesuai dengan tingkat ancaman dan kondisi di lapangan. Dengan penentuan status yang jelas, TNI dapat merencanakan dan melaksanakan operasi keamanan dengan efektif, serta bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Papua.

#### **Permasalahan dan Dasar Hukum**

Penanganan konflik di Papua oleh TNI didasarkan pada berbagai undang-undang dan peraturan yang relevan. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (UU No. 21 Tahun 2001 dan perubahannya) memberikan Papua otonomi untuk mengelola kepentingan lokal, dengan tujuan untuk memberikan keadilan dan

kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Pemekaran wilayah diatur oleh UU No. 45 Tahun 1999 dan UU No. 2 Tahun 2021, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik. Inpres No. 9 Tahun 2020 diterbitkan untuk mempercepat pembangunan di Papua, mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Peraturan Pemerintah mengenai lambang daerah (PP No. 77 Tahun 2007 dan PP No. 23 Tahun 2021) serta Keppres No. 68 Tahun 2020 membentuk badan pengarah pembangunan yang bertugas mengkoordinasikan berbagai program pembangunan di Papua. Selain itu, berbagai undang-undang lain, termasuk UU Pertahanan, Hak Asasi Manusia, Pembangunan Daerah, dan Keuangan Negara, juga relevan dalam konteks penanganan konflik di Papua. Dasar hukum ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi TNI dan instansi terkait dalam melaksanakan tugas mereka di Papua. Dalam implementasinya, TNI berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pelaksanaan Otsus melalui berbagai pendekatan strategis.

Pertama, TNI berfungsi sebagai aktor utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di Papua, khususnya dalam menghadapi gerakan separatis dan konflik sosial. Tugas ini mencakup pengamanan wilayah, pencegahan aksi kekerasan, dan penanganan situasi darurat. Dalam melaksanakan tugasnya, TNI berkoordinasi dengan pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan aktor-aktor lainnya untuk memastikan bahwa operasi keamanan tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan adat istiadat setempat. Kedua, dalam konteks Otsus, TNI juga berperan dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Papua. Program-program TNI, seperti pembinaan teritorial dan kegiatan sosial kemasyarakatan, diarahkan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan. Kegiatan ini melibatkan pemberian bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan dukungan terhadap infrastruktur lokal, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketiga, TNI terlibat dalam proses dialog dan mediasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat adat. Peran ini penting dalam menciptakan suasana kondusif bagi pelaksanaan kebijakan Otsus dan penyelesaian konflik. TNI berperan sebagai fasilitator dalam pertemuan-pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan harmonis. Terakhir, TNI mematuhi prinsip-prinsip hukum dan regulasi yang diatur dalam UU Otsus dan peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 dan Nomor 107 Tahun 2021. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Otsus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua langkah penanganan konflik sesuai dengan ketentuan hukum dan berkontribusi pada tercapainya stabilitas dan kesejahteraan masyarakat Papua.

### **3.3 Pengembangan Strategi TNI**

Pengembangan strategi TNI dalam menangani konflik di Papua menjadi sebuah agenda krusial dalam upaya menciptakan perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan keragaman tantangan yang dihadapi, TNI telah mengadopsi serangkaian pendekatan dan strategi yang dirancang untuk mengatasi konflik secara holistik. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pengembangan strategi TNI dalam konteks konflik Papua. Peneliti mencoba untuk menggambarkan konsep strategi yang akan di

gunakan dari hasil mempelajari data fakta serta upaya yang telah dilakukan pemerintah yang di ko-laborasikan dengan keinginan yang di sampaikan masyarakat Papua melalui keterwakilan yang di sampaikan oleh salah satu informan.

Strategi TNI dalam menangani konflik di Papua telah menjadi topik yang menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Papua, sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sejarah panjang konflik, memerlukan pendekatan yang tepat untuk mencapai perdamaian yang berke-lanjutan. Dalam mengembangkan strateginya, TNI telah memperkenalkan berbagai pendekatan dan langkah-langkah untuk menangani konflik yang kompleks di wilayah ini. Salah satu pendekatan yang digunakan oleh TNI adalah strategi "*smart power*". Strategi ini mencakup gabungan dari "*hard power*", "*soft power*", dan diplomasi militer. Dengan menggunakan kombinasi ini, TNI berharap dapat mengatasi konflik vertikal di Papua dengan cara yang lebih efektif. Pendekatan ini mengakui bahwa tantangan keamanan di Papua tidak hanya bersifat militer, tetapi juga melibatkan aspek-aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, strategi "*smart power*" dirancang untuk lebih responsif terhadap dinamika konflik yang ada di lapangan.

Langkah konkret dalam pengembangan strategi ini adalah pembentukan Koops Habema oleh Panglima TNI. Koops Habema merupakan sebuah komando operasi yang dibentuk khusus untuk menangani konflik di Papua. Dengan adanya Koops Habema, diharapkan TNI dapat mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri sehingga penanganan konflik di Papua menjadi lebih terkoordinasi dan efektif. Langkah ini menunjukkan komitmen TNI dalam menghadapi tantangan yang kompleks di Papua. Selain itu, peran Korem 172/Praja Wira Yakti (PWY) juga menjadi kunci dalam penyelesaian konflik di Papua. Korem 172/PWY fokus pada upaya mempertemukan perbedaan pendapat yang semakin dalam dan luas di Papua. Melalui reposisi peran dan rekon-solidasi daya dukung penyelesaian konflik, Korem 172/PWY berusaha menciptakan kondisi yang lebih akomodatif bagi penyelesaian konflik di wilayah ini. Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Korem 172/PWY menunjukkan komitmen TNI dalam melibatkan aktor-aktor lokal dalam proses penyelesaian konflik.

Salah satu aspek penting dalam strategi TNI adalah pendekatan kesejahteraan. TNI menyadari bahwa penyelesaian konflik tidak hanya dapat dicapai melalui pendekatan militer, tetapi juga memerlukan pendekatan yang lebih holistik yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua. Pendekatan ini melibatkan berbagai aspek, seperti pendekatan agama, budaya, kesetaraan, penghargaan terhadap HAM, dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan mengintegrasikan pendekatan kesejahteraan ke dalam strateginya, TNI berharap dapat menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi penyelesaian konflik di Papua. Selain upaya-upaya tersebut, TNI juga terus melakukan evaluasi dan koreksi terhadap kebijakan keamanan di Papua. Evaluasi ini mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan konflik serta menghentikan praktik impunitas yang terus berlangsung. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa strategi TNI selalu sesuai dengan dinamika konflik yang ada di lapangan dan memperoleh dukungan yang luas dari masyarakat. Meskipun demikian, strategi TNI juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah penggunaan kekuatan berlebihan yang telah menimbulkan korban jiwa dan pelanggaran HAM. Meskipun TNI telah berkomitmen untuk menghentikan

penggunaan kekuatan berlebihan, tan-tangan ini tetap menjadi fokus utama dalam penanganan konflik di Papua. Selain itu, meningkatnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah juga menjadi dampak dari peningkatan kehadiran aparat keamanan di wilayah ini. Secara keseluruhan, strategi TNI dalam menangani konflik di Papua memiliki dampak yang kompleks dan bervariasi. Meskipun telah memberikan beberapa kemajuan, masih ada tantangan yang perlu diatasi dalam rangka mencapai perdamaian yang berkelanjutan di wilayah ini. Oleh karena itu, terus dilakukannya evaluasi, koreksi, dan penataan ulang terhadap strategi TNI adalah kunci dalam mencapai tujuan akhir penyelesaian konflik di Papua.

### **Pengembangan Strategi Smart Power**

TNI telah mengembangkan strategi "*smart power*" yang mencakup kombinasi berbagai elemen, seperti "*hard power*", "*soft power*", dan diplomasi militer. Pendekatan ini dirancang untuk mengatasi konflik di Papua dengan lebih efektif. "*Hard power*" digunakan untuk menegakkan hukum dan keamanan, sedangkan "*soft power*" bertujuan untuk mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. Diplomasi militer juga menjadi bagian penting dari strategi ini, dimana upaya dilakukan untuk membangun hubungan interpersonal antara prajurit serta menciptakan kesamaan pandangan tentang pendekatan dalam penyelesaian masalah di Papua.

### **Pembentukan Koops Habema**

Panglima TNI telah membentuk Komando Operasi (Koops) Habema sebagai langkah strategis dalam menangani konflik di Papua. Koops Habema diharapkan dapat mengintegrasikan pola operasi antara TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua dapat berjalan lebih efektif. Kolaborasi antara kedua institusi keamanan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam penanganan berbagai tantangan keamanan yang dihadapi di Papua.

### **Pendekatan Kesejahteraan**

Pendekatan kesejahteraan menjadi salah satu pendekatan yang ditekankan dalam penanganan konflik di Papua. Pendekatan ini meliputi berbagai aspek, seperti pendekatan agama, budaya, kesetaraan, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan pelestarian lingkungan hidup. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik di Papua dengan cara yang lebih humanis dan berorientasi pada kebutuhan serta aspirasi masyarakat Papua.

### **Peran Masyarakat Papua**

Masyarakat Papua harus dianggap sebagai penentu utama dalam penyelesaian konflik di wilayah tersebut. Oleh karena itu, TNI perlu meningkatkan peran serta masyarakat Papua dalam proses penyelesaian konflik. Dialog dan koordinasi dengan masyarakat Papua menjadi kunci dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan membangun kepercayaan di antara kedua belah pihak.

### **Evaluasi dan Koreksi Kebijakan**

TNI juga harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan keamanan yang ada di Papua. Evaluasi ini harus dilakukan secara komprehensif, dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan konflik. Selain itu, praktik impunitas yang terus berlangsung juga perlu dihentikan. Peninjauan kembali

kebijakan keamanan yang ada akan membantu TNI dalam menyesuaikan strategi mereka agar lebih efektif dalam menangani konflik di Papua.

### 3.4 Rekomendasi Kebijakan dalam Menanggulangi Konflik di Papua

Papua merupakan wilayah yang telah lama menjadi pusat perhatian nasional dan internasional akibat dinamika sosial, politik, dan keamanan yang kompleks. Gerakan separatis yang terjadi di Papua menimbulkan tantangan besar bagi upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan dan memajukan kesejahteraan di kawasan tersebut. Dalam konteks ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran strategis yang sangat krusial dalam menanggulangi ancaman separatisme sekaligus memastikan terciptanya kondisi yang kondusif untuk pembangunan sosial-ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang dapat diadopsi oleh TNI dalam menghadapi gerakan separatis di Papua, dengan menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang antara upaya keras (*hard power*) dan pendekatan lunak (*soft power*) guna mewujudkan stabilitas keamanan dan kesejahteraan yang berkelanjutan di Papua.

Pertama, Pengoptimalan Badan Pelaksana Percepatan Pembangunan Otonomi Papua. Badan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Otonomi Papua berperan sentral dalam mengarahkan kebijakan pembangunan dan penanganan konflik di Papua. Badan ini diharapkan menjadi lembaga yang tidak hanya menjalankan program pembangunan, tetapi juga menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan daerah, serta TNI/Polri, untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam penanganan gerakan separatis. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pelaksanaan TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP). Salah satu fokus dari OMSP adalah penanganan gerakan separatis yang mengancam keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peran Badan Pelaksanaan ini harus mencerminkan koordinasi yang terpadu antara operasi militer yang dilakukan oleh TNI dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Kedua, Evaluasi dan Revisi SOP Operasional TNI di Papua. Revisi dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) TNI di Papua merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas operasi militer di wilayah ini. Papua memiliki tantangan geografis dan sosial yang unik, termasuk kondisi medan yang sulit dan dinamika sosial yang kompleks. Oleh karena itu, SOP yang berlaku harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional di lapangan. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI memberikan TNI hak untuk melakukan operasi militer dan tindakan lain yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya. Ini termasuk melakukan penyesuaian terhadap SOP sesuai dengan dinamika di lapangan. Namun, revisi SOP ini tidak hanya harus mempertimbangkan aspek teknis dan taktis, tetapi juga harus memperhatikan aspek hak asasi manusia (HAM) dan hukum internasional.

Teori Strategi Militer, khususnya Teori Operasi Kontra-Pemberontakan, menekankan pentingnya fleksibilitas dalam operasi militer. Dalam konteks operasi kontrapemberontakan, keberhasilan sering kali bergantung pada kemampuan militer untuk menyesuaikan strategi dan taktik dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, revisi SOP harus mencerminkan fleksibilitas ini dan memberikan panduan yang jelas bagi pasukan di lapangan tentang bagaimana menghadapi berbagai situasi

yang mungkin terjadi. Selain itu, revisi SOP juga harus mencakup panduan tentang bagaimana TNI dapat bekerja sama dengan aktor non-militer, seperti pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional, dalam upaya menangani konflik di Papua. Hal ini penting karena konflik di Papua bukan hanya masalah militer, tetapi juga masalah sosial, ekonomi, dan politik.

Penting juga untuk melakukan pelatihan secara rutin bagi personel TNI yang bertugas di Papua, agar mereka selalu siap dan mampu menyesuaikan diri dengan SOP yang baru. Evaluasi lapangan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa SOP yang diterapkan efektif dan relevan dengan situasi yang ada. Dengan adanya evaluasi dan revisi yang berkelanjutan, SOP TNI di Papua diharapkan dapat menjadi alat yang efektif dalam menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut, serta mengurangi potensi pelanggaran hak asasi manusia yang dapat memper-buruk situasi konflik.

Ketiga, Peningkatan Koordinasi Antar Instansi dan Kementerian. Koordinasi antar instansi dan kementerian merupakan faktor kunci dalam keberhasilan upaya penanganan konflik di Papua. Konflik di Papua bukan hanya masalah militer, tetapi juga terkait dengan isu-isu sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang terpadu dan holistik yang meli-batkan berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI memberikan kerangka hukum bagi TNI untuk berkoordinasi dengan instansi lain dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pasal 11 undang-undang ini menyatakan bahwa TNI berhak melakukan operasi militer dan tindakan lain yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya. Namun, agar operasi tersebut efektif, TNI perlu bekerja sama dengan instansi lain yang memiliki tanggung jawab di bidang yang terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemendikpolhukam), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah.

Keempat, Pengembangan Strategi *Smart Power*. Strategi *Smart Power* merupakan kombinasi dari penggunaan kekuatan militer (*Hard Power*) dan kekuatan non-militer seperti diplomasi dan pembangunan (*Soft Power*). Dalam konteks penanganan konflik di Papua, strategi ini dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk mengatasi kompleksitas konflik yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari keamanan hingga kesejahteraan masyarakat. Penggunaan *Hard Power* oleh TNI dalam menangani gerakan separatis di Papua, seperti operasi militer untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tentu masih diperlukan. Namun, pendekatan ini harus diimbangi dengan penggunaan *Soft Power* untuk memenangkan "*hearts and minds*" masyarakat Papua. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) Un-dang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang mengatur bahwa selain operasi militer untuk perang, TNI juga dapat melakukan operasi militer selain perang (OMSP) yang meliputi penanganan separatisme dan terorisme, yang secara tidak langsung berhubungan dengan upaya stabilisasi keamanan dan peningkatan kesejahteraan.

Teori Kombinasi *Hard Power* dan *Soft Power* mendukung pendekatan ini, dengan menekankan bahwa kombinasi dari kedua jenis kekuatan tersebut dapat menghasilkan hasil yang lebih efektif dalam menangani konflik bersenjata. Misalnya, setelah TNI melakukan operasi militer untuk menumpas gerakan separatis, pemerintah harus segera melanjutkan dengan program-program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti

pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan peningkatan ekonomi lokal. Pengembangan strategi Smart Power juga memerlukan kerjasama yang erat antara TNI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aktor-aktor non-pemerintah seperti organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional. Dalam hal ini, diplomasi dan dialog harus menjadi bagian penting dari strategi keseluruhan, yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas jangka panjang di Papua.

Kelima, Peningkatan Program Pembangunan Sosial dan Ekonomi. Peningkatan program pembangunan sosial dan ekonomi di Papua merupakan salah satu kunci untuk mengurangi ketegangan dan konflik di wilayah tersebut. Seperti yang telah diketahui, salah satu akar permasalahan yang melatarbelakangi konflik di Papua adalah ketidakadilan ekonomi dan sosial yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemerintah harus fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua melalui berbagai program pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan. Teori Keamanan Manusia menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti akses terhadap kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan keamanan, dalam menciptakan kondisi yang stabil dan damai. Dalam konteks Papua, program-program pembangunan sosial dan ekonomi yang meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar ini sangat penting untuk mengurangi ketidakpuasan yang menjadi pemicu konflik.

Program pembangunan sosial dan ekonomi di Papua harus mencakup beberapa aspek penting, seperti: 1) Pembangunan Infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan layanan komunikasi; 2) Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan. Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah; 3) Pemberdayaan Ekonomi Lokal. Pemerintah harus memberikan dukungan kepada masyarakat Papua untuk mengembangkan ekonomi lokal, misalnya melalui pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, dan pengembangan pasar lokal; 4) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan. Masyarakat Papua harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pembangunan di wilayah mereka. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan akan memastikan bahwa program-program tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Keenam, Penguatan Intelijen dan Evaluasi. Penguatan intelijen merupakan elemen krusial dalam penanganan gerakan separatis di Papua. Tanpa intelijen yang akurat dan andal, upaya untuk menanggulangi gerakan separatis akan mengalami hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, penguatan kemampuan intelijen harus menjadi prioritas dalam strategi penanganan konflik di Papua.

Penguatan intelijen di Papua harus mencakup beberapa aspek penting, seperti: 1) Peningkatan Kapasitas Teknologi Intelijen, 2) Pengembangan Sumber Daya Manusia, 3) Kolaborasi dengan Komunitas Lokal, dan 4) Evaluasi Berkala. Dengan penguatan intelijen yang komprehensif, diharapkan TNI dan pemerintah dapat lebih efektif dalam menangani gerakan separatis di Papua, serta mengurangi risiko terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang dapat memperburuk situasi konflik.

Ketujuh, Penerapan Pendekatan Humanis dalam Operasi Militer. Penerapan pendekatan humanis dalam operasi militer di Papua sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dari konflik bersenjata terhadap masyarakat sipil. Pendekatan ini menekankan pada perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan pembangunan komunitas, serta mengutamakan dialog dan kerjasama dengan masyarakat lokal untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Penerapan pendekatan humanis dalam operasi militer di Papua dapat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti: 1) Pelatihan Hak Asasi Manusia untuk Personel Militer; 2) Pendekatan Dialog dan Negosiasi; 3) Penyediaan Bantuan Kemanusiaan; 4) Kerjasama dengan Lembaga Kemanusiaan.

Kedelapan, Peningkatan Transparansi dan Keadilan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam. Hal ini sangat penting untuk mengurangi potensi konflik dan membangun hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat Papua. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam di Papua ditegakkan secara ketat dan adil. Hal ini termasuk penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab, serta memastikan bahwa perizinan untuk eksploitasi sumber daya alam diberikan dengan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penegakan hukum yang kuat akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat Papua bahwa pemerintah serius dalam menangani masalah ini.

#### 4. Kesimpulan

Mabes TNI memegang peranan penting sebagai pusat kendali utama dalam penanganan konflik di Papua. Berbagai langkah dan kebijakan telah diambil oleh Mabes TNI untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di wilayah tersebut. Penanganan konflik di Papua membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, TNI, masyarakat adat, dan kelompok separatis. Penentuan status daerah konflik penting untuk memastikan bahwa respon TNI terhadap ancaman di Papua dilakukan secara tepat dan proporsional, sesuai dengan tingkat ancaman dan kondisi di lapangan. Pengembangan strategi TNI dalam menangani konflik di Papua dilakukan dengan strategi "*smart power*". Strategi ini mencakup gabungan dari "*hard power*", "*soft power*", dan diplomasi militer.

#### Daftar Pustaka

- Aldiano, H. N. (2019). *Kebijakan Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla Dalam Upaya Membangun Dialog Untuk Penyelesaian Konflik Vertikal Papua Tahun 2014-2019* (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Sciences).
- Asmoro, N., & Swastanto, Y. (2021). Konsepsi Pengelolaan Pulau Terdepan Sebagai Forward Operating Base Dalam Mewujudkan Keamanan Nasional (Sebuah Tinjauan Scenario Planning). *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 11(2), 1-14.
- Gumelar, I., & Nachrawi, G. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anggota Tni Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(2).

- Hafiz, M., & Pratama, S. M. (2021). Tinjauan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(1), 87-104.
- Hidayat, A., & Arafat, Z. (2022). Tinjauan Yuridis Peran Brigade Mobil (Brimob) dalam Menangani Konflik Bersenjata di Wilayah Papua Dihubungkan dengan Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 13-39.
- Kaisupy, D. A., & Maing, S. G. (2021). Proses negosiasi konflik papua: dialog Jakarta-Papua. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(1), 82-98.
- Kennedy, P. S. J. (2016). Modul Ekonomi Mikro Teori Perilaku Konsumen Dengan Pendekatan Ordinal.
- Kobesi, S., Pekuwali, U. L., & Tadeus, D. W. (2019). Konflik Kewenangan Polri dan TNI dalam Penanganan Keamanan di Daerah Perbatasan Negara Indonesia dengan Negara-Negara Tetangga. *Jurnal Hukum Proyuris*, 1(1), 1-11.
- Kurniawan, B., Martinus, D. A. W., & Sudiana, I. M. (2024). Peningkatan Peran Intelijen TNI Sebagai Strategi Soft Power Pada Kebijakan Pertahanan Guna Penanganan Terorisme. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 12(2).
- Lelemboto, J. O. (2023). Tindak pidana pembunuhan oleh kelompok bersenjata di papua ditinjau dari undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951. *Lex Crimen*, 12(2).
- Lubis, A. F. (2022). *Hukum Operasional Dalam Strategi Perang Dan Militer Dalam Operasi (Kesiapan Perwira Hukum Tni Ad Dalam Doktrin Hukum Operasional)*. Penerbit Qiara Media.
- Mansyur, Z. (2022). Peran Komando Kewilayahan Dalam Membantu Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pangan (Studi Kampung Moibaken Dan Kampung Suneri Di Kabupaten Biak Numfor). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(2), 257-276.
- Merina, B. (2023). Analisis Konflik di Papua Dengan Teknik Sistematis Review. *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, 7(1), 19-36.
- Nugroho, Y. A. (2022). Implementasi Pendidikan Karakter Kebangsaan Dalam Kegiatan Pra Rekrutmen Dan Seleksi Personel Polri Di Polda Papua. *Journal Of Public Policy and Applied Administration*.
- Sianturi, B. H., & Hanita, M. (2020). Optimalisasi Peran Polri dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. *jurnal keamanan nasional*, 6(1), 73-94.
- Simanjuntak, H. R., Fadelan, F., & Haryanto, A. (2023). Edukasi Penyebaran Uang Rupiah Oleh TNI AL dan Bank Indonesia di Wilayah Masyarakat Terpencil Tertinggal dan Terluar Sebagai Strategi Penguatan Pertahanan Negara. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 2616-2620.

- Suhendrawan, D., Apriyanto, I. N. P., Prakoso, L. Y., Taufik, R. M., Ansori, A., Parwata, I. N., ... & Purwanto, S. A. (2023). Penataan Wilayah Pertahanan Di Provinsi Papua Guna Menghadapi Potensi Ancaman Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(8), 3319-334.
- Sumirat, P. A., & Eriyanto, E. (2023). Koalisi Wacana dalam Debat Pemekaran Papua: Analisis Jaringan Wacana Debat Pemekaran Tiga Provinsi Baru di Papua. *Jurnal Riset Komunikasi*, 6(2), 1-20.
- Suropati, U. (2019). Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(1), 73-89.
- Wanzira, A. M. (2022). *Perlindungan Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM di Papua* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Wibowo, D. E. (2023). *Pelibatan Tentara Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Tindak Pidana Yang Terjadi Di Papua Sebagai Gerakan Terorisme* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).